

## **Ketidakstabilan Politik Indonesia Tahun 1959-1966**

**Fadhilla Romadhan<sup>1</sup>, Zul Asri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

(\*)[fadhillaromadhan2@gmail.com](mailto:fadhillaromadhan2@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The years 1959 to 1966 were also one of the striking periods in Indonesia's political history. The period was characterised by the problems of political instability that occurred in Indonesia, such as with regard to the problems of major parties and the military that played an important role in political matters. This research uses the historical method, library study type. The stages of this research are, first, collecting sources or data, second, conducting source criticism, third, analysing sources, fourth, writing. The sources used are theses and dissertations, books, encyclopedias, regulations, decrees, yearbooks, and other sources, both print and electronic. The problem to be discussed is about what factors and their impact on political instability in Indonesia in 1959-1966. The results and discussion are, In 1959-1966, Indonesian politics experienced significant instability due to ideological conflict. Soekarno introduced NASAKOM to unite the three ideologies. Soekarno's implementation of Guided Democracy created an authoritarian political configuration. The situation was exacerbated by political conflict, social turmoil, and an economic crisis, including high inflation and budget deficits. Foreign policy conflict with Malaysia. There was tension between the central and local governments.*

**Keywords:** *Instability, Indonesian Politics, Guided Democracy*

### **ABSTRAK**

Tahun 1959 hingga dengan tahun 1966 juga merupakan salah satu dimana periode tersebut merupakan periode yang mencolok dalam sejarah politik Indonesia. Periode tersebut ditandai dengan masalah ketidakstabilan politik yang terjadi di Indonesia, seperti yang berkenaan dengan masalah partai-partai besar dan militer yang memainkan peran penting dalam masalah politik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, jenis Studi Pustaka. Adapun tahapan penelitian ini yakni, pertama Mengumpulkan sumber atau data, kedua, melakukan Kritik Sumber, ketiga menganalisis sumber, keempat melakukan penulisan. Adapun sumber yang digunakan yakni, tesis dan disertasi, buku, ensiklopedia, peraturan, ketetapan, buku tahunan, dan sumber lainnya, baik cetak maupun elektronik. Adapun permasalahan yang akan dibahas yakni tentang apa saja faktor serta dampaknya terhadap ketidakstabilan politik di Indonesia tahun 1959-1966. Adapun hasil dan pembahasan yakni, Tahun 1959-1966, politik Indonesia mengalami ketidakstabilan signifikan akibat konflik Ideologi. Soekarno memperkenalkan NASAKOM untuk menyatukan tiga ideologi. Penerapan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno menciptakan konfigurasi politik yang otoriter. Situasi diperparah oleh konflik politik, gejolak sosial, dan krisis ekonomi, termasuk inflasi tinggi dan defisit anggaran. Terjadinya konflik Politik luar negeri dengan Malaysia. Terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.

**Kata Kunci :** **Ketidakstabilan, Politik Indonesia, Demokrasi Terpimpin**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia ialah suatu negara yang selalu bermain dalam sistem politiknya, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 (Rahmatullah, 2016). Indonesia sering kali ikut membahas mengenai masalah politik dalam menghadapi tantangan dan masalah yang sering dialami untuk dapat menciptakan stabilitas politik. Tahun 1959 hingga dengan tahun 1966 juga merupakan salah satu dimana periode tersebut merupakan periode yang mencolok dalam sejarah politik Indonesia (Muksin, 2018). Periode tersebut ditandai dengan masalah ketidakstabilan politik yang terjadi di Indonesia, seperti yang berkenaan dengan masalah partai-partai besar yang pernah ada di Indonesia yang memainkan peran penting dalam masalah politik (Fadli, 2020). Selain para partai-partai besar yang memainkan perannya dalam urusan politik, para kaum elite seperti militer Indonesia juga selalu memberi pengaruh hebat dalam urusan politik (Setyahadi, 2018).

Pada masa tersebut Indonesia menjadi salah satu saksi berbagai peristiwa bersejarah yang secara dramatis memengaruhi perkembangan politik dan pemerintahan. Masalah Ideologis antara kelompok nasionalis, agama dan paham komunis menjadi landasan bagi konsep Nasakom, yang menimbulkan ketegangan mencolok pada dinamika politik (Winata & Purwaningsih, 2017). Pada periode ini pernah terjadinya masalah konflik yang cukup besar pada ketiga kelompok tersebut dalam urusan Ideologis yang berkaitan erat dengan urusan politik di Indonesia (Sjuchro & Besman, 2020). Konflik tersebut berkenaan dengan perbedaan fundamental dalam pandangan mereka tentang bagaimana Indonesia seharusnya diarahkan secara politik, sosial dan ekonomi.

Masalah Regional yang pernah terjadi seperti ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga tidak sedang baik-baik saja, juga menjadi salah satu faktor yang nantinya akan mengancam dalam urusan negara (Azis, n.d.). Proses demokrasi dipimpin dalam pelaksanaannya mengarah pada kekuasaan presiden yang sangat dominan dalam urusan perpolitikan di Indonesia (Millata & Rohmah, 2023). Dalam hal ini dimana cita-cita dari Soekarno yang berupaya ingin menyatukan ketiga unsur ideologi tersebut dapat direalisasikan pada masa demokrasi dipimpin. Ide dari presiden Soekarno yang menekankan pada masalah persatuan bisa dilihat dari sikapnya yang berhadapan dengan kaum federalis daerah yang berada di luar pulau Jawa serta menggabungkan tradisi ideologi yang bertentangan (Argenti, 2017).

Sejauh ini studi mengenai ketidakstabilan politik Indonesia tahun 1959 hingga 1966 tidak banyak yang membahasnya, namun terdapat beberapa penelitian yang mengarah kearah penelitian tersebut yakni, pertama, Setyahadi, M. M. (2018). Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Konflik internal di antara pimpinan Angkatan Darat baru di mulai ketika pada 23 Juni 1962 jabatan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat digantikan oleh Letnan Jendral Achmad Yani (Setyahadi, 2018). Kedua, Sjuchro, D. W., & Besman, A. (2020). Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1966). Pemikiran Soekarno tentang Nasakom pada masa demokrasi dipimpin bukanlah sebuah pemikiran politik yang muncul tiba-tiba, tapi merupakan sebuah konsep pemikiran yang telah ia rumuskan sejak tahun 1920-an

(Sjuchro & Besman, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan dari penelitian sebelumnya terutama mengenai Ketidak Stabilan Politik Indonesia Tahun 1959-1966. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penyebab yang membuat politik indonesia bisa menjadi tidak stabil pada 1959-1966, serta mengidentifikasi peristiwa-peristiwa kunci yang memainkan peran sentral dalam perkembangan politik saat itu, menjelaskan pergeseran kekuasaan, dan merinci dinamika politik yang kompleks. Penelitian ini memiliki relevansi yang lebih luas daripada sekadar sejarah Indonesia. Ketidakstabilan politik yang diteliti memiliki implikasi cukup signifikan dalam pemahaman tentang dinamika politik di negara-negara berkembang yang baru merdeka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode Sejarah dengan pendekatan Kualitatif, dan termasuk dalam jenis penelitian Studi Literatur. Konsep Studi Literatur pada penelitian ini berfokus pada pengumpulan data atau referensi yang relevan dengan subjek penelitian (Khilmiyah, 2016). Adapun sumber ataupun data yang digunakan dalam penulisan ini ialah, tesis dan disertasi, buku, ensiklopedia, peraturan, ketetapan, buku tahunan, dan sumber lainnya, baik cetak maupun elektronik, dapat memberikan informasi ini (Nugrahani & Hum, 2014). Dalam hal ini, penulis melakukan seleksi dan analisis terhadap berbagai sumber yang digunakan, kemudian menyajikannya dalam bentuk jurnal atau artikel ilmiah (Ramdhan, 2021). Penggunaan pendekatan kualitatif ini searah dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami penyebab dari ketidakstabilan politik di Indonesia selama periode 1959 hingga 1966. Dengan demikian, metode penelitian ini berfokus pada analisis data historis dan literatur yang telah ada, serta untuk menganalisis dan memahami akar masalah ketidakstabilan politik tersebut dalam periode yang telah disebutkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Indonesia**

Politik ialah keadaan atau suatu hal yang berhubungan dengan manusia, yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Politik sendiri dalam bahasa Inggris *Politic* yang menunjukkan akan sifat seseorang atau perbuatan dari orang tersebut. Kata *Politik* sendiri berkembang dengan cepat yang diserap kedalam bahasa Indonesia dengan tiga makna, yaitu; Pertama, semua urusan dan tindakan. Kedua, berkaitan dengan pemerintahan. Ketiga nama untuk sebuah ilmu atau pengetahuan (Nambo & Puluwuluwa, 2005). Politik ialah suatu sikap atau perilaku manusia, yang berhubungan dengan kegiatan, aktivitas, maupun sikap yang bertujuan memberi pengaruh serta mempertahankan akan suatu tatanan baik itu dalam kelompok masyarakat maupun pemerintahan dengan menggunakan kekuasaan (Indrawan, 2017). Politik Indonesia merujuk pada sistem dan proses politik yang ada di Indonesia, termasuk struktur pemerintahan, partai politik, serta kebijakan dan dinamika politik yang terjadi di negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri dimana menganut akan sistem pemerintahan presidensial, yakni seorang Presiden merupakan suatu pemimpin dari sebuah negara (Haboddin, 2017). Dimana pemimpin negara atau presiden

di Indonesia dipilih dengan cara melalui pemilihan umum yang akan dipilih ulang setiap lima tahun sekali (Rikardo, 2020).

Dalam sistem pemerintahan pada politik Indonesia sistemnya terbagi menjadi, Pertama, Eksekutif dimana Presiden dibantu oleh para kabinet-kabinet yang diantaranya terdiri atas menteri-menteri yang telah ditetapkan oleh presiden itu sendiri, dalam membantu menyelesaikan pekerjaan negara, baik itu berkaitan dengan pelaksanaan dari Undang-Undang, penetapan kebijakan maupun untuk bagian administrasi negara. Kedua, ada yang namanya Legislatif yaitu terdiri atas MPR dengan bagian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dimana tugas dari DPR itu sendiri yaitu membuat Undang-Undang. Sedangkan DPD lebih fokus terhadap masalah pada suatu daerah serta menerima usulan yang diberikan oleh setiap daerah. Ketiga, adanya Yudikatif, dimana dalam sistem pemerintahan Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi dengan tugas dalam mengawal serta memutuskan mengenai masalah pemilu (Ramdhani, 2021). Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam mengawal konstitusi dan memutus sengketa pemilu. Sehingga Politik Indonesia merupakan cerminan dari keberagaman dan kompleksitas masyarakatnya, dengan berbagai tantangan dan peluang dalam upaya menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratis (Hasibuan, 2019).

### **Politik Indonesia Tahun 1959-1966**

Politik Indonesia pada periode tahun 1959 hingga 1966 ditandai dengan ketidakstabilan politik yang signifikan, gejolak sosial, serta perubahan rezim yang mendalam (Argenti, 2017). Salah satu ciri khas politik Indonesia pada periode ini adalah konflik ideologis yang mencolok (Winata & Purwaningsih, 2017). Konflik tersebut terutama melibatkan persaingan dan ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Konsep (NASAKOM) yang menggabungkan ketiga ideologi ini menjadi dasar bagi pemerintahan saat itu (Sjuchro & Besman, 2020). Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM) dipopulerkan oleh presiden Soekarno sebagai upaya untuk menggabungkan ketiga ideologi tersebut. Dalam tujuan tersebut terjadinya ketegangan serta konflik terhadap masalah politik di Indonesia. Saat itu, Soekarno, sebagai upaya untuk menciptakan persatuan di antara tiga ideologi utama di Indonesia. Namun, konsep ini juga memunculkan ketegangan dan konflik dalam dinamika politik. Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dua partai besar yang muncul sebagai kekuatan politik utama (Chaq, 2022).

Pada masa Demokrasi liberal banyaknya partai-partai yang bermunculan yang akan bergerak nantinya dalam sistem pemerintahan sebagai akibat dari dijalankannya sistem politik demokrasi liberal parlementer yang mengikuti gaya barat (Arta, 2022). Dimana tercatat hampir 30 partai, serta 4 diantaranya merupakan partai yang memberi pengaruh besar dalam urusan pemerintahan Indonesia. Partai tersebut diantaranya PNI, Masyumi, NU serta PKI (Putri, 2024). Pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya yang berakhir dengan sebuah anggapan sebagai awal dari kemunculan demokrasi terpimpin,

menyebabkan berakhirnya politik yang demokratis pada 1959 (Harisman et al., 2020). Pada masa demokrasi terpimpin menampilkan konfigurasi politik yang otoriter. Sebab hanya partai PKI yang hanya memiliki peran dalam urusan politik, sedangkan partai lainnya tidak dipebolehkan (Hadi, 2015). Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia dan juga Militer pada masa Demokrasi terpimpin, dimana mereka merupakan 3 unsur yang mendominasi dalam masalah politik di Indonesia (Sholehuddin, 2015). Sedangkan untuk politik luar negeri secara tidak langsung Indonesia bersekutu dengan negara-negara komunis dan juga sosialis, sebab mereka anti kolonial serta anti barat (Gouda & Zaalberg, 2007). Selain itu hubungan antara Presiden Soekarno dengan Militer mereka sangat akrab, sebab pada masa demokrasi terpimpin, para militer lebih banyak memiliki kekuasaan dalam urusan politik dan juga urusan pemerintahan, terlebih lagi background dari Soekarno yang merupakan seorang militer (Setyahadi, 2018). Antara presiden Soekarno dan TNI mereka saling membutuhkan, dimana Soekarno membutuhkan kekuatan dari TNI untuk menekan kekuatan oposisi. Supaya Soekarno tidak terlalu bergantung terhadap Angkatan Darat, sehingga Soekarno membina dari Angkatan Udara dan juga PKI (Arta, 2022).

Selain itu pertentangan antara Soekarno dengan pihak militer terjadi pada saat TNI AD mencoba menolak gagasan NASAKOM. Akibat dari penolakan tersebut membuat Presiden Soekarno menyatukan tiga partai besar yakni, PKI, PNI dan NU dengan tujuan mendapat dukungan dari ketiga partai besar tersebut. Akibatnya TNI AD kembali menolak sebab komunis ikut dimasukkan di dalamnya yang tidak sesuai dengan misi dari TNI AD (Setyahadi, 2018). Adanya kedekatan antara PKI dengan Presiden Soekarno, membuat PKI berusaha untuk mencari citra kepada Soekarno. Dengan cara menjadi bagian dari Pancasila dalam mendukung kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkan (Anwar, 2006). Ajaran dari NASAKOM yang dilaksanakan oleh presiden Soekarno, akhirnya PKI mengambil kesempatan tersebut sebaik-baiknya, sebab mereka mendapat tempat sebagai bagian yang sah terhadap konstalasi politik (ROBIYANI, 2015). Pada masa Demokrasi Terpimpin dimana, selain dari masalah tentang Ideologi pada masa tersebut Indonesia juga dihadapi dengan masalah regional. Masalah tersebut terjadi antara pemerintah pusat dan beberapa daerah otonom (Muksin, 2018). Adanya permintaan bagi otonomi daerah serta terjadinya ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah, hal tersebut tentunya akan mengancam dari kepentingan negara. Akibat terjadinya kisruh politis di pusat akibat daerah-daerah yang ada malah mendapat dampak negatif ketimbang dampak positif (Arta, 2022). Sehingga membuat para perwira politikus yang berada di daerah mencoba melakukan pergerakan untuk pembangunan di daerah-daerah. Hal tersebut terlihat secara jelas dalam bentuk tuntutan para mereka terhadap pemerintahan pusat yang berkenaan tentang pelaksanaan otonomi daerah yang jelas dan transparan (Maulida, 2018).

Masalah politik yang terjadi pada tahun 1960-an semakin parah, dimana konflik yang sporadis antar setiap kekuatan-kekuatan politik tersebut mulai terlihat, serta masuk ke wilayah pedesaan (Hüsken, 1998). Riuhs-rendahnya percaturan politik yang ditandai dengan adanya masalah konflik yang terjadi secara tersembunyi, hingga mengakibatkan terjadinya benturan terbuka di antara setiap kekuatan politik di lembaga kenegaraan. Selain

itu adanya dampak yang harus dirasakan masyarakat, dimana seharusnya pembangunan yang nyata terbentuk di daerah-daerah dalam menunjang masalah perekonomian masyarakat (Sunandar et al., 2020). Malah mengakibatkan terabaikannya pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Selain itu terjadinya peningkatan hutang luar negeri serta inflasi yang meningkat. Dalam sebuah karya tulis Arndt, yang menjelaskan tentang buruknya keadaan perekonomian Indonesia (Hill, 2000). Ia menjelaskan bahwa apabila Indonesia dapat menyelesaikan semua masalah hutang luar negerinya, hal tersebut akan memberikan dampak buruk dimana, habisnya devisa Indonesia untuk membiayai anggaran rutin yang diperlukan nantinya. Pada 1965 dimana Inflasi naik mencapai 550% bahkan tahun 1966 melonjak menjadi lebih kurang 650% (Rajab, 2004).

Indonesia sejak tahun 1963 dihadapkan dengan masalah ekonomi selain dari masalah politik yang terjadi pada tahun sebelumnya, dimana hal ini juga memberikan infeksi terhadap ekonomi Indonesia (Hidayat, 2022). Dimana pada masa ini pula banyaknya pengeluaran atau pencetakan rupiah untuk memenuhi pengeluaran, sehingga terjadinya inflansi, yang membuat segala bahan pangan menjadi mahal. Selain itu juga akibat dari para penguasa politik yang selalu ingin mencampuri masalah sektor ekonomi secara berlebihan. Efek dari hal tersebut membuat manajemen usaha ekonomi serta pembangunan ekonomi yang dilakukan, akhirnya tidak bisa diterapkan (Millata & Rohmah, 2023).



(Sumber: <http://surl.li/uindv> diakses pada tanggal 13-01-2024)

### **Faktor Dampak Penyebab Ketidakstabilan Politik Indonesia Tahun 1959-1966**

Ketidakstabilan politik sering kali muncul akibat konflik ideologis antara berbagai kelompok politik, seperti kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Perselisihan pandangan dan tujuan antar kelompok ini dapat menciptakan ketegangan politik. Demokrasi Terpimpin soekarno tidak memberikan peluang mengenai tentang perbedaan pendapat, dalam menghadapi akan isu-isu politik penting yang terjadi pada masa tersebut. Dimana Soekarno berfikir bahwa politik harus berada dibawah satu komando (Arta, 2022). Pada masa-masa sebelumnya banyaknya partai-partai yang tergabung dalam urusan politik di Indonesia seperti, adanya Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo),serta adanya Ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia (IPKI)(Sjuchro & Besman, 2020). Meski banyak partai yang ikut dalam urusan perpolitikan Indonesia, namun hanya terdapat empat partai yang mendominasi urusan

politik pada masa tersebut, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) serta Partai Komunis Indonesia (PKI) (Argenti, 2017). Namun adanya kekuatan politik efektif lainnya yang mengimbangi dari partai yang ada, yaitu Angkatan Bersejata khususnya Angkatan Darat. Dimana pada saat itu Militer merupakan pasukan kekuatan yang tidak menyetujui para komunis ikut terlibat dalam urusan politik Indonesia. Sehingga mereka dikenal dengan istilah politik Anti komunis (Setyahadi, 2018).

Pada 1959, presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang dibacakan pada saat berlangsungnya upacara di Istana Merdeka, dalam pembacaan tersebut tertuang beberapa perihal mengenai tentang, Pembubaran Badan Konstituante, diberlakukannya kembali UUD 1945 serta dibentuknya MPRS dan DPAS (Sjuchro & Besman, 2020). Kekuatan politik nasionalis pada saat itu yang sangat menonjol ialah PNI, Agama, NU serta PKI. Hal tersebutlah akhirnya memposisikan Soekarno sebagai titik kekuasaan. Hal tersebut kemudian membuat antara Militer dan PKI saling berebut pengaruh terhadap kepemimpinan Soekarno pada saat itu. Sejak 1959 Politik dan pemerintahan Indonesia didominasi oleh tiga kekuatan besar dalam urusan politik yakni, Presiden Soekarno, kedua TNI AD dan PKI (Argenti, 2017). Soekarno mencoba mengakhiri mengenai masalah Ideologi yang berbeda antara TNI AD dan PKI, namun hal tersebut malah tidak sesuai dan memberi pengaruh yang lebih luas untuk PKI di Indonesia (Millata & Rohmah, 2023). Meski Presiden Soekarno telah membuat Nasakom yang menggabungkan antara Nasionalis, Agama dan juga Komunis, namun hal tersebut tidak bisa diterima penuh oleh pihak TNI Angkatan Darat. Sehingga membuat TNI AD marah, dan menjadi penghalang bagi PKI dalam memperluas pengaruhnya di Indonesia. Hal ini membuat Soekarno menjadi sangat bergantung pada dukungan massa serta jaringan Internasional PKI dalam menjalankan politik luar Negerinya yang penuh dengan konfrontasi (Sjuchro & Besman, 2020).

Selain itu hubungan politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Soekarno juga menjadi, penyebab ketidaksatbilannya politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia dimana mereka mengambil sikap akan anti Kolonialisme serta Imperialisme yang ditunjukkan dalam berbagai faktor pada pengambilan sikap oleh Pemerintah Indonesia (Yumetri Abidin, 2019). Pada saat Proklamasi dari Federasi Malaysia yang tetap dilaksanakan tanggal 16 September 1963, Pemerintah Indonesia menilai tentang apa yang dilakukan Malaysia adalah sebuah perbuatan yang melanggar terhadap PBB. Sehingga membuat pemerintah Indonesia mengambil keputusan dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur (Hidayat, 2022). Hal ini akhirnya membuat keadaan semakin parah, akibat dari politik yang terjadi, membuat rakyat yang berada di wilayah Jakarta melakukan aksi Demonstrasi kepada Kedutaan Besar Malaya serta Inggris yang berada di Jakarta pada saat itu. Kemudian masyarakat Malaya juga melakukan Demonstrasi balasan kepada Kedutaan Besar Indonesia yang berada di wilayah Kuala Lumpur. Selain hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia juga memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak serta Sabah (Yumetri Abidin, 2019).

Seperti halnya pengambilan sikap politik dengan anti nekolim, sehingga membuat dua konsep baru dalam urusan politik yaitu Nefo dan Oldefo (Putra, n.d.). Pada konfrontasi Indonesia dengan Malaysia menyebabkan Indonesia sempat mundur sebagai anggota dari PBB. Akibat dari rangkaian usaha rekonsiliasi yang tidak sesuai rencana, malah membuat keadaan semakin parah, selain itu karena tersiar kabar yang berusaha membuat Malaysia menjadi salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga membuat Presiden Soekarno mengambil keputusan, dimana dalam pidatonya tanggal 31 Desember 1964 salah satu isinya yakni, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang (Yumetri Abidin, 2019). Karena masuknya Malaysia kedalam anggota PBB serta ingin menjadi anggota dari dewan keamanan tidak tetap PBB (Sutrisno, 2013). Pada masa ini Indonesia dihadapkan dengan keadaan atau situasi yang sangat sulit, dimana tahun 1963 hingga dengan tahun 1966, dengan dibentuknya negara Federasi Malaysia menjadi masalah yang dihadapi oleh Indonesia, hal tersebut karena akibat dari Presiden Soekarno yang menjalankan sikap politik yang konfrontatif (Hidayat, 2022).

Sehingga akhirnya memberi dampak terhadap pemerintah Indonesia, yakni Indonesia mengalami akan masalah Defisit (Pratiwi, 2016). Dimana hal ini membuat nilai dari kurs rupiah mengalami penurunan atau Inflasi pada nilai Rupiah, selain itu juga menurunnya Devisa Indonesia pada tahun 1960. Penurunan tersebut karena pengeluaran yang terjadi di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan pemasukkan negara, seperti pengeluaran untuk masalah pembangunan dan juga pengeluaran yang rutin. Akibat dari penurunan defisit yang terus terjadi sehingga Presiden Soekarno melakukan tindakan moneter yakni dilakukannya penurunan pada nilai mata uang, seperti RP.1000, menjadi RP.1. Selain itu karena sikap politik yang bersifat konfrontatif, Indonesia malah menghadapi banyak masalah yakni tentang masalah pertahanan seperti Konfontasi dengan Malaysia (Millata & Rohmah, 2023). Selain itu masalah ekonomi Indonesia yang belum juga terselesaikan, malah memperburuk keadaan, dimana akibat dari peningkatan Inflasi membuat harga pangan naik dengan drastis, seperti melonjaknya harga beras di Indonesia membuat masyarakat semakin resah, selain itu juga pemerintah yang selalu mengimpor beras membuat cadangan Visa yang seharusnya untuk pembangunan malah berkurang (Hill, 2000).

## **KESIMPULAN**

Politik di Indonesia merupakan refleksi dari keberagaman dan kompleksitas masyarakatnya, dengan peran penting dalam tata kelola pemerintahan serta interaksi kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, politik mencakup urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diatur dalam sistem presidensial, di mana presiden dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Dalam eksekutif, presiden dibantu oleh kabinet menteri, sementara legislatif terdiri dari DPR dan DPD yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan masalah daerah. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi mengawal konstitusi dan



menyelesaikan sengketa pemilu. Periode 1959-1966 dalam politik Indonesia ditandai oleh ketidakstabilan yang signifikan, diwarnai oleh konflik ideologis antara nasionalis, agama, dan komunis.

Presiden Soekarno berusaha menggabungkan tiga ideologi utama dalam konsep NASAKOM. Namun, malah memperburuk keadaan politik, dengan PKI, militer, dan pemerintah pusat saling berebut pengaruh. Politik luar negeri yang konfrontatif, terutama terhadap Malaysia, memperburuk situasi domestik. Hubungan Soekarno dengan militer dan PKI juga menjadi sumber ketegangan, dengan militer menolak komunis dalam pemerintahan. Ketidakstabilan politik Indonesia pada periode tersebut disebabkan oleh konflik ideologis, kebijakan konfrontatif, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dekrit Presiden Soekarno pada 1959 yang memberlakukan UUD 1945 kembali, membubarkan konstituante, dan membentuk MPRS serta DPAS memperlihatkan usaha sentralisasi kekuasaan. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia dan keputusan politik yang tidak bijak memperburuk situasi ekonomi dengan inflasi tinggi dan defisit anggaran. Inflasi yang melonjak menyebabkan harga pangan seperti beras naik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2006). *Sukarno, tentara, PKI: segitiga kekuasaan sebelum prahara politik, 1961-1965*. Yayasan Obor Indonesia.
- Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 14.
- Arta, K. S. (2022). Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966. *Candra Sangkala*, 4(1), 1–9.
- Azis, F. A. (n.d.). *HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA ERA ORDE LAMA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1966*.
- Chaq, M. A. (2022). *MPRS Dalam Arus Perpolitikan Indonesia 1960-1971*. Kendi Publisher.
- Fadli, M. R. (2020). Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 34–49.
- Gouda, F., & Zaalberg, T. B. (2007). *Indonesia merdeka karena Amerika?: politik luar negeri AS dan nasionalisme Indonesia, 1920-1949*. Penerbit Serambi.
- Haboddin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. Universitas Brawijaya Press.

- Hadi, S. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum. *Addin*, 9(2).
- Harisman, T. A., Mulyadi, R. M., & Nugrahanto, W. (2020). Pembredelan Surat Kabar Pikiran Rakjat Tahun 1965. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 12(1), 103–117.
- Hasibuan, I. J. M. (2019). *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*.
- Hidayat, A. (2022). KEBIJAKAN EKONOMI SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965). *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Hill, H. (2000). *The Indonesian Economy*. Cambridge University Press.
- Hüsken, F. (1998). Masyarakat desa dalam perubahan zaman: sejarah diferensiasi sosial di Jawa, 1830-1980. (*No Title*).
- Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak komunikasi politik dan opini publik terhadap perilaku masyarakat. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 171–179.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru.
- Maulida, F. H. (2018). HITAM PUTIH PRRI-PERMESTA: KONVERGENSI DUA KEPENTINGAN BERBEDA. *Paradigma*, 8(2), 174–185.
- Millata, C. I., & Rohmah, N. S. (2023). Penyimpangan Dalam Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Kekuasaan Presiden Soekarno yang Tak Terbatas. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)*, 20(2), 268–286.
- Muksin, A. (2018). Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 777–788.
- Nambo, A. B., & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik). *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.

- Pratiwi, S. E. (2016). Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin. *AVATAR, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Putra, N. (n.d.). TRANSFORMASI SOSIAL INDONESIA PASCA PERISTIWA 1965. *Universitas Pertahanan*.
- Putri, L. R. (2024). *Sukarno : Respon Terhadap Ketidakstabilan Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal 1956-1959*. 1–8.
- Rahmatullah, R. (2016). *Dinamika Politik Islam Di Indonesia Pra Kemerdekaan Sampai Indonesia Merdeka*. Pascasarjana UIN-SU.
- Rajab, B. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh. *Sosiohumaniora*, 6(3), 182.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ramdhani, H. T. (2021). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT JENDERAL SEBAGAI INSTANSI BANTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD. *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(01), 53–66.
- Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51–71.
- ROBIYANI, A. (2015). *PERJUANGAN MAHASISWA INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA TAHUN 1945-1966 (Studi Pergerakan Mahasiswa Angkatan 66)*. IAIN SMH Banten.
- Setyahadi, M. M. (2018). Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). *Jurnal Renaissance*, 3(01), 346–357.
- Sholehuddin, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1).
- Sjuchro, D. W., & Besman, A. (2020). Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1966). *Jurnal Representamen Vol*, 6(02).

- Sunandar, A., Purnomo, B., & Siregar, I. (2020). *Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Widjojo Nitisastro 1966-1998*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Sutrisno, H. (2013). *Konfrontasi Indonesia-Malaysia Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia*. *Skripsi*. Surabaya: *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya*.
- Winata, L., & Purwaningsih, S. M. (2017). Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965. *Avatara*, 5(3), 728–737.
- Yumetri Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*. Lembaga Penerbitan UNAS.